



## Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut

Cucu Ardian

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Responden dalam penelitian ini sebanyak 36 orang pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati dalam mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

**Kata Kunci:** Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati.

### 1. Pendahuluan

Pada otonomi daerah, kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan tugas yang semakin berat, maka untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, kepala daerah perlu dibantu oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Diantara kebutuhan masyarakat yang ada, terdapat kebutuhan yang sangat penting yaitu kebutuhan akan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

Berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017, jelas bahwa dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut diharapkan mampu melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan akhirnya akan mensukseskan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. Ketertiban bangunan dan penghuni bangunan;
2. Ketertiban jalan, jalur hijau dan trotoar;
3. Ketertiban ruang terbuka hijau;

4. Ketertiban sungai, saluran, danau/situ dan mata air;
5. Ketertiban usaha pariwisata;
6. Ketertiban kependudukan; dan
7. Ketertiban sosial.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai implementasi kebijakan mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yaitu dengan dilakukannya kegiatan patroli setiap hari, memantau kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum ke seluruh kecamatan secara bergiliran, melakukan himbauan-himbauan langsung kepada warga masyarakat, himbauan secara *online* melalui berbagai sosial media seperti : facebook, instagram, twiteer, serta melakukan himbauan dengan cara menempelkan plang himbauan di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Bentuk himbauan tersebut diantaranya : jangan menempelkan spanduk iklan/partai,dll di setiap taman kota di wilayah Kabupaten Garut, plang menghimbau jangan ada transaksi jual beli yang disebarluaskan di sepanjang Jl. A. Yani Kecamatan Garut Kota serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sering mengadakan kegiatan sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut ke tiap kecamatan yang dihadiri oleh kepala kelurahan, kepala desa serta tokoh masyarakat agar disosialisasikan kembali ke masyarakat setempatnya. Data pencapaian program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tersebut merupakan data yang diperoleh dari survei secara *online* menggunakan google formulir yang disebarluaskan melalui media sosial. Sebanyak 1400 respon yang memberikan tanggapan mengenai keberhasilan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Garut ternyata sebagian besar masyarakat (48,1%) merasakan bahwa kebijakan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) kurang berhasil. 32,2 % berhasil, 13% menyatakan sangat berhasil dan 6,7 % menyatakan tidak berhasil. Pada kolom komentar yang wajib diisi pada google formulir mengenai pencapaian program kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengetahui dan mengerti tentang substansi, apa saja yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dari kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) karena kurangnya sosialisasi pemerintah, sebagian masyarakat kurang menyadari pentingnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) serta tidak ada keingintahuan dan menutup telinga terhadap segala bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

Menurut Gibson (dalam Iskandar, 2019), bahwa tingkat yang paling dasar mengenai efektivitas pencapaian program adalah efektivitas yang menekankan pada kinerja tugas dari pegawainya. Diperkuat lagi oleh hasil penelitian yang dilakukan Mulyadin (2016) bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kinerja pegawai terhadap efektivitas pelaksanaan program kebijakan. Berdasarkan data pencapaian program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), kurang efektivitasnya pencapaian program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) diakibatkan karena kurangnya kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Merujuk dari hasil penelitian dari YR. Utomo, N. Widowati (2017) bahwa “implementasi kebijakan berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat”. Semakin banyak jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat, maka semakin rendah implementasi kebijakan tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah pelanggaran masyarakat maka implementasi kebijakan tersebut dikatakan berhasil.

Melihat data jumlah pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Garut pada tahun 2018 dan 2019 bahwa setiap bulannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan masyarakat. Bahkan jika dilihat dari tabel tersebut sebagian besar jumlah pelanggaran tiap bulan terus menerus mengalami kenaikan. Pelanggaran Peraturan

Daerah yang semakin bertambah tiap bulannya tersebut diakibatkan karena kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan ketegasan petugas membuat masyarakat lebih berani melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Sesuai dengan pendapat menurut Polidano yang dikutip oleh Maesarah (2017), bahwa “kinerja sangat penting agar kebijakan dapat diterapkan pada waktu yang tepat agar berhasil dan berguna”. Sehingga banyaknya pelanggaran dari kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tersebut menjadikan program dari kebijakan tersebut kurang berhasil maka harus dibarengi dengan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai petugas dalam penegakan peraturan daerah tersebut harus ditingkatkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dituntut kinerjanya harus lebih baik, lebih giat dan perlu ditingkatkan agar pelanggaran kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) menurun sehingga pencapaian efektivitas program ketertiban, kebersihan dan keindahan dapat terwujud. Disisi lain, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di tengah masyarakat, sering diidentik dengan Satuan Polisi Pamong Praja itu arogan, keras dan jauh dari humanis serta dilihat oleh masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu ada kata “tidak punya hati” (sumber: Republika.co.id -19/07/2020, 19:28 WIB). Sehingga apabila anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menurunkan angka pelanggaran peraturan daerah tersebut dilakukan lebih tegas maka dikhawatirkan anggapan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja akan lebih negatif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut melalui Kepala Satuan nya yaitu Drs. Hendra Gumilar, MM membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih humanis, dekat dengan masyarakat serta masyarakat tidak memandang/beranggapan lagi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu arogan, keras tapi sekarang lebih humanis walaupun tetap ketegasan harus tetap diutamakan yang nantinya akan berdampak kepada penurunan angka pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017.

Satuan Tugas (Satgas) Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Desember 2018 di Hotel harmoni Garut langsung oleh Bupati Garut. Satuan tugas Merpati tersebut berjumlah 36 orang perempuan yang dibagi kedalam 3 regu kerja yaitu regu 1, regu 2 dan regu 3. Setiap regu berjumlah 12 orang dengan dipimpin oleh seorang Danru (Komandan Regu) dan satu orang Danton (Komandan Peleton).

Satuan tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut memiliki program-program kegiatan yang sejalan dengan pencapaian efektivitas program kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) diantaranya: program Gadis Daerah (Gerakan Disiplin Daerah/GDD), program anak sekolah bolos (Ansebol), program penertiban para tunangan (tunawisma dan gelandangan), program anjal (anak jalanan) ,anak funk serta memberikan layanan Posyandu Gakda (Pos Pelayanan dan Pengaduan Penegakan Peraturan Daerah).

Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut mempunyai tugas tambahan dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja laki-laki yaitu:

- a. Sebagai negosiator: dalam pelaksanaan penertiban peraturan daerah, satuan tugas Merpati memiliki fungsi untuk melakukan interaksi kepada masyarakat bersama-sama menemukan masalah dan solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan psikologis.

- b. Sebagai sosialisator: sebelum dilaksanakannya penertiban, seminggu sebelumnya selalu diadakan sosialisasi atau pemberitahuan mengenai adanya penertiban di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat yg berada di daerah tersebut dapat menyiapkan diri.
- c. Sebagai fasilitator: Sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam berinteraksi. Satuan tugas Merpati ini memiliki fungsi sebagai pendengar, menyampaikan pesan untuk dapat mematuhi peraturan daerah dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, terdapat sejumlah permasalahan terkait kinerja satuan tugas merpati di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yaitu diantaranya:

**Pertama**, kurangnya pendidikan dan pelatihan anggota Satuan Tugas Merpati sehingga kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pegawai Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut masih kurang. Satuan Tugas Merpati merupakan kumpulan dari para pegawai perempuan yang sebagian besar berasal dari *staff* kantor dari berbagai bidang di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Sebagian besar dari Satuan Tugas Merpati hanya bisa bekerja administrasi saja atau bekerja menggunakan komputer. Hanya 15 orang dari Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang merupakan pekerja lapangan yang memiliki keahlian lapangan seperti langsung terjun ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan, pengaduan atau menyelesaikan suatu permasalahan, dll. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan dilapangan sangat penting agar satuan tugas Merpati memiliki keahlian dilapangan. Bawa semenjak dibentuk Satuan Tugas Merpati sudah mendapatkan dua kali pendidikan dan pelatihan. Dilihat dari data jumlah pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) pada tahun 2018 dan 2019 pada tabel 1, setiap bulan mengalami kenaikan. Berarti dengan jumlah pendidikan dan pelatihan Satuan Tugas Merpati hanya dua kali, maka pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) meningkat dan menunjukan pendidikan dan pelatihan bagi satuan tugas Merpati tersebut kurang.

**Kedua**, kurangnya personil anggota Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Satuan tugas merpati hanya berjumlah 36 orang. Apabila dibandingkan dengan tugas pencapaian efektivitas program kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang mencangkup seluruh Kabupaten Garut dengan 42 kecamatan sangatlah tidak sebanding.

**Ketiga**, terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah juga menjadi hambatan bagi kinerja pegawai satuan tugas merpati yang berakibat efektivitas pencapaian program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) khususnya dalam pelaksanaan penegakan kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) terganggu. Penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dilaksanakan secara bertahap dengan skala prioritas menurut urgensinya. Sesuai dengan pendapat dari Mulyaningsih (2017) bahwa: Salah satu implementasi kebijakan akan bersumber pada sumber daya pada sumber daya manusia dan sumber daya material lain seperti finansial atau anggaran. Proses penyusunan anggaran masih belum efektif sehingga dapat mengakibatkan anggaran yang disusun tidak efektif maka kinerja yang dihasilkan juga belum memuaskan.

**Keempat**, sering terjadinya bentrok pekerjaan antara tugas sebagai Satuan Tugas Merpati dan sebagai pegawai yang bekerja di setiap bidangnya. Anggota Satuan Tugas Merpati berasal dari pegawai yang berada pada bagian/bidang yang berbeda-beda. Setiap bidang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga setiap pegawai memiliki kesibukan dan pekerjaan dengan beban kerja yang berbeda-beda pula. Namun, mereka juga harus membagi waktunya

dengan tugas sebagai Satuan Tugas Merpati. Tetapi, sering kali karena adanya tugas yang *deadline* yang perlu diselesaikan dibidangnya, maka tugas sebagai Satuan Tugas Merpati menjadi terbengkalai dan tidak bisa bekerja bersama-sama dengan anggota lainnya.

**Kelima**, kesenjangan pegawai satuan tugas Merpati yang disebabkan karena perbedaan status kepegawaian antara pegawai Satuan Tugas Merpati. Satuan Tugas Merpati mempunyai status kepegawaian dan pendidikan yang berbeda-beda. Status kepegawaian dan pendidikan yang dimiliki oleh anggota merpati membedakan dalam mendapatkan gaji pokok. Setiap pegawai Satuan Tugas Merpati memiliki tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan masing-masing yang dibedakan sesuai dengan tingkat pendidikan disetiap bidangnya. Namun terlepas dari itu, mereka tergabung menjadi Satuan Tugas Merpati memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama dengan pembagian jadwal setiap hari yang merata disetiap regunya. Dengan gaji pokok yang berbeda-beda tetapi memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama sebagai Satuan Tugas Merpati menjadikan adanya suatu kesenjangan diantara pegawai Satuan Tugas Merpati.

Selain itu, sebagian besar pegawai Satuan Tugas Merpati merupakan pegawai berstatus Non PNS. Banyak kekhawatiran pimpinan tentang resiko beban kerja di lapangan yang tinggi tidak dibarengi dengan asuransi jiwa atau tunjangan dalam bentuk materi kepada anggota sehingga pimpinan tidak bisa memporsir kinerja Satuan Tugas Merpati yang dominan anggota Non PNS untuk bekerja lebih giat lagi.

Sesuai yang dikemukakan Iskandar (2019) bahwa implementasi kebijakan dapat memengaruhi kinerja pelaksana/pegawai, hal ini disebabkan pelaksana melaksanakan tugas pokok dan fungsi pekerjaannya dengan merujuk pada kebijakan sebagai pedoman. Iskandar (2019) juga mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh kelompok dan perorangan dengan saling pengertian dan pertimbangan bersama yang berpedoman pada suatu standar kerja. Adapun Gibson (dalam Iskandar, 2019) mengemukakan bahwa keefektifan pencapaian program dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Orang adalah sumberdaya yang umum bagi organisasi. Dari penjelasan Gibson tersebut dapat diambil benang merah bahwa efektivitas dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Dalam hal ini SDM tidak mungkin lepas dari peran dan fungsinya dalam organisasi tersebut, sehingga sejauhmana SDM pada organisasi itu menghasilkan kinerja maka sejauh itu pula efektivitas dapat dicapai. Hal ini dapat menjelaskan hubungan antara kinerja dengan efektivitas.

Berdasarkan fenomena masalah dan terori-teori tersebut yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti lebih mendalam tentang implementasi kebijakan, kinerja pegawai Satuan Tugas Merpati dan efektivitas pencapaian program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Sebagaimana yang terungkap pada fenomena permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul: “**Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut**”.

## 2. Metodologi

### 2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Menurut Iskandar (2013: 174) bahwa penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua fenomena atau lebih. Metode penelitian deskriptif dapat memperluas ruang lingkup menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

### 2.2 Populasi dan Sampel

Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi (*population target*) dari penelitian ini adalah Pegawai Satuan Tugas (Satgas) Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Objek atau unit analisis pada penelitian ini adalah individu.
- b. Individu tersebut yaitu pegawai Satuan Tugas (Satgas) Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
- c. Populasi memiliki ciri-ciri: pegawai PNS perempuan, karyawan honorer perempuan yang bertugas dikantor maupun dilapangan yang bekerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

Jumlah populasi sebanyak 36 orang pegawai Satuan Tugas Merpati. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu teknik sampling sensus/jenuh. Menurut Sugiyono (2016:) dalam teknik sampling sensus/jenuh ini semua anggota populasi dijadikan sampel hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 36 orang pegawai Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

### 2.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala *Likert* dengan gradasi sangat positif sampai sangat negatif. Pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban dikelompokkan dalam suatu data berskala ordinal dengan kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

### 2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan path analysis tahapan Menguji Koefisien Jalur  $\rho_{yx}$ , Membuat invers Matrik Korelasi ( $R^{-1}$ ), Menghitung besar pengaruh, Menentukan besar pengaruh variabel lain dan Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung

## 3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis deskripsi variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan menunjukkan kriteria **baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi struktur birokrasi dan disposisi yaitu Setiap kegiatan dalam implementasi kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah memiliki SOP yang jelas dan Kepala Satpol PP Kab. mendukung Satuan Tugas Merpati dalam mengimplementasikan kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Persentase terendah terdapat pada dimensi komunikasi yaitu Sosialisasi kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dilaksanakan setiap hari dan pada dimensi disposisi yaitu Kepala Satpol PP Kab. Garut memberikan penghargaan kepada Satuan Tugas Merpati dalam meningkatkan implementasi kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- b. Hasil analisis deskripsi variabel Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati menunjukkan kriteria **baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Kemampuan yaitu Lingkungan kantor Satpol PP Kab. Garut berpengaruh terhadap kinerja Satuan Tugas Merpati dan dimensi Komunikasi yaitu Komunikasi antar pegawai Satuan Tugas Merpati dengan pimpinan terjalin dengan baik. Persentase terendah terdapat pada dimensi Kemampuan yaitu Satuan Tugas Merpati sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dimensi Komunikasi yaitu Adanya kerjasama antar pegawai Satgas Merpati dengan pimpinan.
- c. Hasil analisis deskripsi variabel Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan menunjukkan kriteria **baik**, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Penyusunan Program yang Tepat yaitu Satuan Tugas Merpati mengetahui program inti Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Persentase terendah terdapat pada dimensi Pelaksanaan Program yaitu Pelaksanaan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang dillakukan Satuan Tugas Merpati sudah tepat sasaran.

Selanjutnya, temuan-temuan permasalahan penting lainnya yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pada variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam dimensi komunikasi dan disposisi terdapat kelemahan hal ini didasarkan pada penilaian terendah pada variabel tersebut yaitu Sosialisasi kebijakan K3 dilaksanakan setiap hari yaitu dan dimensi Disposisi yaitu Kepala Satpol PP Kab. Garut memberikan penghargaan kepada Satuan Tugas Merpati dalam meningkatkan implementasi kebijakan K3. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum tersampaikan secara menyeluruh dan optimal khususnya kepada masyarakat.
- b. Pada variabel Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati dalam dimensi Kemampuan yaitu Satuan Tugas Merpati sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan pada dimensi Komunikasi yaitu Adanya kerjasama antar pegawai Satgas Merpati dengan pimpinan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari kantor untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Satuan Tugas Merpati secara berkesinambungan dan lebih ditingkatkan lagi kerjasama atau koordinasi antara pimpinan dan Satuan Tugas Merpati.
- c. Pada variabel Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam dimensi Pelaksanaan Program yaitu Pelaksanaan program K3 yang dilakukan Satuan Tugas

Merpati sudah tepat sasaran. hal tersebut disebabkan karena sosialisasi program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Merpati belum tepat menjangkau seluruh masyarakat.

### 3.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Implementasi Kebijakan (X) Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati (Y) dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program (Z)

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $F_{tabel}$  yaitu  $F_{hitung} = 3,4803 < F_{tabel} = 3,290$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati (Y) dalam mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Z).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* ( $R^2_{YZX}$ ) sebesar **0,1633**. Nilai ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (X) berpengaruh signifikan namun pengarunya lemah terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati (Y) dalam mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Z) yaitu sebesar 16,33%, sedangkan sisanya ( $P_{yzx}$ ) sebesar 83,67% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Solichin (dalam Iskandar, 2019) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran kedalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

### 3.2 Pengujian Sub Hipotesis Terdapat Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (X) terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati (Y)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur ( $P_{yx}$ ) sebesar **0,3420**. didapatkan jumlah  $Sig = 041 < 0,05$   $H_0$  Ditolak (X berpengaruh signifikan terhadap Y). Perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} = 2,1237 > t_{tabel} = 2,037$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati.  $R^2$  = 0,117 (X mempunyai kontribusi pengaruh sebesar 11,7% terhadap Y). Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati. Adapun besar pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati adalah sebesar 11,70% sedangkan sisanya sebesar 88,30% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang tidak dimasukkan kedalam model. Walaupun pengaruhnya lemah namun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan memiliki pengaruh positif tetapi didalam pelaksanaannya belum serta merta dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Satuan Tugas Merpati, hal ini dikarenakan banyak faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

### 3.3 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati (Y) terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Z)

Pengujian analisis jalur diperoleh nilai koefisien jalur ( $P_{zy}$ ) sebesar **0,4298**. Dari data uji signifikansi tersebut, nilai  $Sig = 0,016 < 0,05$ , melihat perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} = 2,4559 > t_{tabel} = 2,037$  maka  $H_0$  Ditolak (Y berpengaruh signifikan terhadap Z). Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga variabel Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

R square = 0,165 (Y mempunyai kontribusi pengaruh sebesar 16,50% terhadap Z). Besar pengaruh variabel Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati terhadap variabel Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan secara langsung adalah sebesar 16,50% sedangkan sisanya sebesar 83,50% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel variabel Kinerja Pegawai satuan Tugas Merpati yang tidak dimasukan kedalam model.

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati memiliki pengaruh positif namun didalam pelaksanaannya belum serta merta dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan karena nilai pengaruhnya lemah, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban.

Hal ini didukung dengan pendapat menurut Gibson (dalam Iskandar, 2019), bahwa tingkat yang paling dasar mengenai efektivitas pencapaian program adalah efektivitas yang menekankan pada kinerja tugas dari pegawainya. Diperkuat lagi oleh hasil penelitian yang dilakukan Mulyadin (2016) bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kinerja pegawai terhadap efektivitas pelaksanaan program kebijakan.

### 3.4 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan keindahan (X) terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Z)

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: “*Terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan*”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur ( $P_{zx}$ ) sebesar **-0,1371**.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Signifikansi =  $0,424 > 0,05$   $H_0$  Diterima (X pengaruh tidak signifikan terhadap Z). Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $t_{hitung} = -0,7965$  lebih kecil dari nilai  $t_{tabel} 2,037$ . Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  diterima, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh tidak signifikan terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi kebijakan ketertiban, kebersihan dan keindahan terhadap kinerja pegawai Satuan Tugas Merpati

dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program ketertiban, kebersihan dan keindahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis utama menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- b. Pengujian sub hipotesis menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati. Hal ini menunjukan bahwa Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati tidak bisa terlepas dari Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Aspek-aspek implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian program meliputi: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.
- c. Pengujian sub hipotesis menyatakan bahwa Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pencapaian Program Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Hal ini menunjukan bahwa Efektivitas Pencapaian Program tidak terlepas dari aspek-aspek yang ada dalam kinerja pegawai, yaitu: kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi.
- d. Pengujian sub hipotesis menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pengaruh tidak signifikan terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Hal ini menunjukan bahwa Efektivitas Pencapaian Program bisa terlepas dari aspek-apsek implementasi kebijakan dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan efektivitas program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- e. Rata-rata jawaban responden terhadap ketiga variabel tersebut adalah Baik.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas dukungan dari Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut yang telah mempublikasikan karya ilmiah ini serta kepada semua pihak yang terkait dalam membantu proses penelitian ini.

## Daftar Pustaka

### I. Buku-buku/Jurnal

- Hasibuan, Malayu S.P, 2019 (Edisi Ke Dua Puluh), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.  
Iskandar, Jusman, 2019. *Bunga Rampai Administrasi Negara*, Puspaga, Bandung.  
Siagian, Sondang., P. 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Binapura Aksara.  
Rachmawati, Ike.  
Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.  
Sutrisno, Edy, 2017 (Cetakan Ke-9), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.

- Kuswana, Ichwan. (2020). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar Terhadap Kinerja UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar*. Magister Ilmu Administrasi Negara-Universitas Garut.
- Mulyaningsih, M. (2017). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Transformasi Budaya Organisasi terhadap Manajemen Sekolah untuk Mewujudkan Efektivitas Penggunaan Budaya Sharing di Lingkungan Pendidikan*. Jurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis (JSAB), 1(1), 57-69.

## II. Dokumen-Dokumen

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.  
Peraturan Daerah Kabupaten Garut NO 18 Tahun 2017 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).